

SKRIPSI

**EVALUASI KEBIJAKAN PELATIHAN DAN
PENDAMPINGAN DALAM MENINGKATKAN SDM
PENGELOLA BUMDES**



Oleh:

ARMIS HAPITRI
NPM. 210411015

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
TELUK KUANTAN
2025**

TANDA PERSETUJUAN

JUDUL : EVALUASI KEBIJAKAN PELATIHAN DAN
PENDAMPINGAN DALAM MENINGKATKAN
SDM PENGELOLA BUMDES DI DESA MARSAWA
KECAMATAN SENTAJO RAYA KABUPATEN
KUANTAN SINGINGI

NAMA : ARMIS HAPITRI

NPM : 210411015

UNIVERSITAS : ISLAM KUANTAN SINGINGI

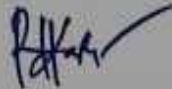
FAKULTAS : ILMU SOSIAL

PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI NEGARA

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II



RIKA RAMADHANTI, S.IP., M.Si
NIDN1030058402



SARIAN M, S.Sos., M.Si
NIDN. 1008128002

Mengetahui,
Ketua Program Studi Administrasi Negara
Universitas Islam Kuantan Singingi



EMILIA EMHARIS, S.Sos., M.Si
NIDN. 1002059002

PENGESAHAN SKRIPSI

Diperiksa dan disahkan oleh panitia Penguji Ujian Skripsi
Program Studi Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi

Pada :
Hari : Senin
Tanggal : 29
Bulan : September
Tahun : 2025

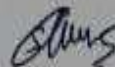
Tim Penguji

KETUA

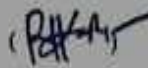
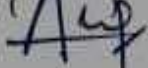


EMILIA EMHARIS, S.Sos., M.Si
NIDN. 1002059002

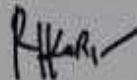
SEKRETARIS



SARJAN M., S.Sos., M.Si
NIDN. 1008128002

1. RIKA RAMADHANTI, S.IP., M.Si (Pembimbing I) ()
2. DESRIADI, S.Sos., M.Si (Anggota Penguji I) ()
3. ALSAR ANDRI, S.Sos., M.Si (Anggota Penguji II) ()

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi



RIKA RAMADHANTI, S.IP., M.Si
NIDN. 1030058402

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat, nikmat, dan hidayah yang diberikan kepada kita, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, dan kesehatan, sehingga kita bisa menunaikan seluruh perintah-Nya dan menjauhi semua larangan. Syawalat dan salam selalu kami panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW serta para sahabat, keluarga dan kita umatnya, dengan harapan mendapat syafaat di akhirat nanti. Dengan segala puji syukur kehadirat Allah SWT, peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Analisis Kebijakan Pendampingan Dan Pelatihan Dalam Meningkatkan Sdm Pengelola Bumdes Di Desa Marsawa Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi berujung pada gelar sarjana bidang sosial (S.Sos) pada program studi Administrasi Negara.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini terdapat kesalahan-kesalahan yang tidak dapat dihindari, oleh karena itu penulis memerlukan kritik dan saran dari para pembaca untuk dapat memberikan karya yang lebih baik di masa yang akan datang.

Selama proses penyusunan dan penulisan skripsi ini, penulis mendapat banyak dukungan dan bantuan dari pihak yang berbeda. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada kepada pihak-pihak yang telah mendukung dan membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada pihak-pihak yang memberikan bantuan, dukungan, serta perhatian kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini yang mana diantaranya kepada :

1. **Ibu Dr. Ikrima Mailani, S.PDi., M.Pdi** selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi.
2. **Ibu Rika Ramadhanti, S.IP., M.Si** selaku Dekan Fakultas Ilmu sosial Universitas islam Kuantan Singingi dan juga selaku Dosen Pembimbing I yang kesabaran dan kerelaan telah membimbing dan memberi petunjuk yang sangat berguna kepada peneliti sehingga terselesainya proposal penelitian ini.

3. **Bapak Emilia Emharis, S.Sos., M.Si** selaku kepala program Studi Administrasi Negara Universitas Islam Kuantan Singingi.
4. **Bapak Sarjan M, S.Sos., M.Si** selaku Dosen Pembimbing II yang juga yang kesabaran dan kerelaan telah membimbing dan memberi petunjuk yang sangat berguna kepada peneliti sehingga terselesainya proposal penelitian ini.
5. Bapak dan ibu dosen serta seluruh Staff Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah banyak membantu dan memberikan banyak ilmu selama penulis menuntut ilmu hingga selesai.
6. Terimakasih kepada Ayahanda dan Ibunda serta saudara yang telah banyak memberikan bantuan dan dukungan, baik secara moril maupun materil serta do'anya untuk penulis dalam menyusun Penelitian ini.
7. Rekan-rekan seperjuangan lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, terima kasih atas semangat dan kerja samanya.

Akhir kata dengan penuh ketulusan penulis berharap skripsi ini dapat berguna untuk kita dan dapat memberi manfaat bagi yang memerlukannya.

Aminn ya Robal'Alamin.

**EVALUASI KEBIJAKAN PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN DALAM
MENINGKATKAN SDM PENGELOLA BUMDES
DI DESA MARSAWA KECAMATAN SENTAJO RAYA
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

ABSTRAK

Badan Usaha Milik Desa adalah lembaga ekonomi yang dibentuk dan dikelola oleh pemerintah desa serta masyarakat desa untuk memperkuat perekonomian desa. tujuan utama bumdes adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan mengembangkan potensi ekonomi yang ada didesa. Pengelolaan bumdes dilaksanakan dengan menggunakan prinsip efektivitas, efisiensi, responsivitas, dan ketepatan. . Penelitian ini dilaksanakan di Desa Marsawa Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi. Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana evaluasi kebijakan pelatihan dan pendampingan dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengelola bumdes. Perumusan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimana evaluasi kebijakan pelatihan dan pendampingan dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengelola bumdes di Desa Marsawa Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan dan memahami secara mendalam terkait permasalahan yang di teliti yaitu Evaluasi Kebijakan Pelatihan dan Pendampingan Dalam Meningkatkan Sumber Daya Manusia Pengelola Bumdes di Desa Marsawa Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi, penelitian ini akan mengeksplorasi dan menganalisis berbagai kebijakan, proses, serta efektivitas pelatihan dan pendampingan. Data yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, yang kemudian diolah dan dianalisis untuk menemukan kunci inti permasalahan yang terjadi. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan mengenai Evaluasi Kebijakan Pelatihan dan Pendampingan Dalam Meningkatkan Sumber Daya Manusia Pengelola Bumdes di Desa Marsawa Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi sudah baik.

Kata Kunci: Evaluasi Kebijakan, Pendampingan, Pelatihan, Bumdes

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK	iii
DAFTAR ISI.....	iv
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
II. LANDASAN TEORI	6
2.1 Teori Administrasi Negara.....	6
2.2 Teori Kebijakan Publik	7
2.3 Teori Evaluasi	9
2.4 Teori Manajemen Sumber Daya Manusia.....	11
2.5 Gambaran Umum Tentang Bumdes.....	13
2.6 Tujuan Pendirian Badan Usaha Milik Desa BUMDes.....	14
2.7 Tantangan Dalam Pengelolaan Bumdes.....	15
2.8 Konsep Pendampingan Dan Pelatihan	16
BAB III METODE PENELITIAN	17
3.1 Jenis Penelitian.....	17
3.2 Infoman Penelitian	17
3.3 Sumber Data Penelitian.....	18
3.3.1 Data Primer	18
3.3.2 Data Sekunder	18
3.4 Fokus Penelitian	19
3.5 Lokasi Penelitian.....	19
3.6 Metode Pengumpulan Data	19
3.6.1 Observasi.....	19

3.6.2 Wawancara.....	19
3.6.3 Dokumentasi	20
3.6.4 Triangulasi.....	20
3.7 Metode Analisis Data.....	20
3.7.1 Reduksi Data	20
3.7.2 Penyajian Data	21
3.7.3 Penarikan kesimpulan dan Verifikasi.....	21
3.8 Jadwal Penelitian.....	22
VI PENUTUP	23
6.1 Kesimpulan	23
6.2 Saran.....	23
DAFTAR PUSTAKA	25

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat desa. Bumdes adalah badan hukum yang didirikan oleh pemerintah desa dan pemerintah kota untuk meningkatkan perekonomian daerahnya, baik melalui pengelolaan badan usaha, pengembangan produktivitas, penyediaan pelayanan, maupun pemanfaatan peluang yang lebih besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kegiatan bumdes bukan hanya soal bisnis, tetapi juga soal membangun kebersamaan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat desa. Bumdes melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang pemenuhan kebutuhan umum masyarakat desa. Kegiatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Seroja telah melakukan kegiatan berupa:

1. Kegiatan simpan pinjam, melakukan kegiatan simpanan sukarela dan berjangka dengan sistem bagi hasil.
2. Perkreditan barang, mengkreditkan berbagai macam barang-barang elektronik, furniture dan keperluan rumah tangga lainnya.
3. Pasar desa, mengelola ruko pasar, lapak, serta parkir pasar desa Marsawa.
4. Unit Sarana Produksi, menyediakan berbagai macam pupuk dan herbisida.
5. Unit Internet Desa, menyediakan layanan pemasangan wifi dirumah-rumah masyarakat.

6. Unit Gedung Olahraga, menyediakan tempat atau sarana untuk kegiatan olahraga, kesenian, dan acara-acara lainnya.
7. Unit Seroja Furniture, menyediakan berbagai macam barang-barang elektronik, furniture, dan keperluan rumah tangga lainnya.
8. Unit Lain-lain, menyediakan berbagai macam alat-alat mesin, minyak jelantah, dan pendapatan dari sumber lain.

Adapun unit usaha yang di jalankan oleh bumdes seroja desa marsawa yaitu furniture, elektronik dan saprodi. Furniture, elektronik dan saprodi adalah tiga komponen yang memiliki peran penting dalam kegiatan usaha dan kehidupan sehari-hari. Pengadaan dan pengelolaan ketiga hal ini menjadi kunci dalam mendukung kelancaran operasional bumdes, membantu menciptakan efisiensi serta meningkatkan produktivitas masyarakat desa. Tabel berikut akan merinci kegiatan terkait pengadaan dan pengelolaan furniture serta saprodi yang dilakukan oleh bumdes.

Tabel 1.1 : Kegiatan Unit Usaha Bumdes Seroja Desa Marsawa.

No.	Unit usaha	Jenis barang
1.	Furniture	1. Sofa 2. Meja rias 3. Lemari 4. Rak piring 5. Tempat tidur
2.	Elektronik	1. Kulkas 2. Mesin cuci 3. Handphone 4. Oven listrik
3.	Saprodi	1. Pupuk kimia 2. Herbisida 3. Alat semprot racun rumput

Sumber : Bumdes Marsawa Tahun 2024.

Peran bumdes di desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan perekonomian daerah, memanfaatkan potensi alam dan manusia sebagai sumber pendapatan perekonomian dan sebagai wahana keberhasilan desa, serta menciptakan perekonomian yang lebih stabil mencapai kesejahteraan untuk membentuk masyarakat desa.

Dengan mendirikan bumdes di desa bertujuan untuk menyasar, memperkuat dan meningkatkan perekonomian pedesaan berdasarkan kebutuhan dan optimalisasi energi desa. Badan Usaha Desa yang selanjutnya disingkat BUMDes adalah suatu bentuk badan hukum yang melindungi kelangsungan kegiatan usaha desa, baik yang berbentuk korporasi maupun tidak.

Pelatihan bumdes yang diselenggarakan setiap satu tahun sekali oleh pihak desa dan kecamatan yang diikuti oleh pengelola bumdes merupakan langkah strategis untuk meningkatkan pengelola bumdes. Namun program pengembangan bumdes melalui pendampingan dan pelatihan masih belum konsisten. Kegiatan pendampingan dan pelatihan bumdes yang seharusnya dilaksanakan secara berkala seringkali terkendala, sehingga pengembangan bumdes menjadi tidak optimal.

Dalam rangka meningkatkan kapasitas pengelola bumdes pelatihan dilakukan dengan pemaparan materi dan sesi tanya jawab. Pemaparan materi saja mungkin tidak cukup untuk sepenuhnya meningkatkan sdm pengelola bumdes. Meskipun pemaparan materi sangat penting untuk memberikan pengetahuan dasar dan teori tentang pengelolaan bumdes, proses pengembangan sdm memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif. Untuk meningkatkan sdm pengelola

bumdes secara efektif, perlu ada kombinasi antara pemaparan materi, praktik langsung, diskusi, dan pendampingan berkelanjutan.

Bumdes di Desa Marsawa seharusnya menjadi motor penggerak dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola. Namun, kenyataannya pendampingan untuk pengelola bumdes belum dilaksanakan. Hal ini berdampak pada kurangnya keterampilan dan pengetahuan dalam mengelola usaha desa, yang pada akhirnya menghambat potensi ekonomi desa itu sendiri. Tanpa pendampingan yang baik, pengelolaan bumdes tidak akan berkembang dengan optimal, dan manfaat yang diharapkan untuk masyarakat desa pun tidak akan tercapai.

Pengelolaan bumdes diyakini memang belum terlaksana sepenuhnya secara profesional. Beberapa permasalahan yang di duga di jumpai di bumdes Desa Marsawa adalah: pertama, kurangnya pemahaman dan keterampilan dalam inovasi dan kreativitas pengelola bumdes. Kedua, kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat yang menyebabkan masyarakat belum dapat memahami secara utuh fungsi keberadaan bumdes. Karena masih banyak masyarakat yang tergantung kepada bank keliling/ rentenir. Ketiga, minimnya kerja sama antara pengelola bumdes, pemerintah desa, dan pihak eksternal. Oleh karena itu, kebijakan pendampingan dan pelatihan dinilai penting untuk meningkatkan kapasitas pengelola Bumdes.

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang di atas, penulis memaparkan hasil bumdes dengan mempertimbangkan studi kasus di Desa Marsawa Kecamatan Sentajo Raya yang merupakan salah satu desa penerima manfaat

bumdes dengan judul penelitian **“Evaluasi Kebijakan Pelatihan dan Pendampingan Dalam Meningkatkan SDM Pengelola BUMDes di Desa Marsawa Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana evaluasi kebijakan dan pelatihan dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengelola bumdes?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana evaluasi kebijakan dan pelatihan dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengelola bumdes.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan arahan konkret bagi pengelola bumdes untuk memperbaiki kinerja operasional mereka melalui penerapan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari kebijakan pendampingan dan pelatihan pengelola bumdes.

II. LANDASAN TEORI

2.1. Teori Administrasi Negara

Menurut Stillman (2019) dalam Mulyawan, dkk (2024: 7) administrasi negara adalah proses merumuskan , melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan pemerintah-pemerintahan.

Menurut Demock dan Koenig dalam Remaja (2017: 4) mengartikan administrasi ke dalam 2 (dua) bagian, yaitu: dalam arti luas, administrasi negara adalah kegiatan negara dalam melaksanakan kekuasaan politiknya. Dalam arti sempit, administrasi negara adalah kegiatan eksekutif dalam penyelenggaraan pemerintah.

Hildawati, dkk (2024: 10) administrasi negara, yang secara konseptual diartikan sebagai "administrasi" suatu "negara" dalam rangka penegakan "kekuasaan eksekutif merupakan perwujudan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan negara.

Dari berbagai pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa administrasi negara adalah proses dan kegiatan yang melibatkan perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan pemerintah yang berfungsi untuk menjalankan kekuasaan politik negara. administrasi negara juga berperan sebagai instrumen utama dalam mewujudkan kekuasaan dan tugas pemerintahan negara secara efektif dan efisien. Administrasi negara juga menjadi landasan penting bagi tata kelola pemerintahan, yang melibatkan seluruh proses pengaturan, pengendalian, dan pelaksanaan

Dengan adanya administrasi yang terstruktur, pemerintah mampu memberikan pelayanan publik yang optimal dan dapat menyesuaikan diri dengan perubahan serta tuntutan masyarakat. Oleh karena itu, administrasi negara tidak hanya dilihat sebagai pekerjaan teknis semata, tetapi juga memiliki dimensi strategis dalam mewujudkan visi dan misi pemerintah.

2.2 Teori Kebijakan Publik

Menurut Thomas R. Dye, penulis buku *Understanding Public Policy*, yang dikutip oleh Riant Nugroho D. (2004: 3) dalam Sore dan Sobirin, (2017: 9) menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan, dan hasil yang membuat sebuah kehidupan bersama tampil.

Easton (1965: 212) dalam Kosassy, dkk (2024: 14) memaknainya sebagai: *the impact of government activity*." Lebih lanjut Easton menjelaskan, kebijakan publik adalah sebuah keputusan politik yang dikembangkan oleh badan dan pejabat pemerintah yang mempunyai otoritas dalam sistem politik.

Menurut pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik dapat dipahami sebagai langkah-langkah atau tindakan yang dilakukan oleh pemerintah atau badan berwenang dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah atau mencapai keadaan tertentu yang dianggap lebih baik. Hal ini mencakup seluruh proses dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan tersebut, untuk memastikan apakah tujuan yang diinginkan dapat tercapai.

Berikut merupakan definisi kebijakan publik menurut beberapa para ahli dalam Prasetya & Pangestuty, (2021: 4-5) :

1. Menurut Dye (1972), kebijakan publik adalah sesuatu yang pemerintah pilih untuk dilakukan atau tidak dilakukan dalam hal menanggapi isu yang berkembang di masyarakat.
2. Menurut Wildavsky (1979), analisis kebijakan publik adalah ilmu terapan yang subjeknya tidak ditentukan sebagai disiplin ilmu, tetapi akan muncul sesuai dengan permasalahan yang dialami masyarakat.
3. Menurut Thoenig (1989), kebijakan publik adalah aksi melakukan sebuah tindakan oleh otoritas publik atau pemerintah dalam sektor tertentu pada masyarakat.
4. Clackre E. Cochran (1999) menyebut kebijakan publik sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan melakukan intervensi untuk mencapai target kebijakan tersebut.
5. Charles L. Cochran dan Eloise F. Malone (2014) mendefinisikan kebijakan publik sebagai kumpulan dari berbagai keputusan politik untuk mengimplementasikan program yang disepakati dalam mencapai tujuan masyarakat
6. B. Guy Peters (2019) mendefinisikan kebijakan publik sebagai kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung yang memiliki pengaruh terhadap kehidupan masyarakat.

Dari berbagai definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan tindakan atau keputusan yang diambil oleh pemerintah dalam rangka menanggapi isu atau permasalahan di masyarakat. Kebijakan ini melibatkan intervensi pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu yang diinginkan, seperti kesejahteraan masyarakat atau pemecahan masalah sosial.

Kebijakan publik bersifat dinamis, sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan masyarakat, serta melibatkan pengimplementasian program dan keputusan politik. Secara keseluruhan, kebijakan publik memiliki dampak yang signifikan, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap kehidupan masyarakat.

2.3 Teori Evaluasi

Evaluasi adalah kegiatan untuk memulai tingkat kinerja suatu kebijakan atau program. Evaluasi baru dapat dilakukan kalau suatu kebijakan sudah berjalan cukup waktu. Memang tidak ada suatu batasan waktu yang pasti kapan sebuah kebijakan yang harus dievaluasi, untuk mengetahui outcome dan dampak suatu kebijakan sudah tentu diperlukan waktu tertentu.

Evaluasi merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam proses implementasi kebijakan dan program pendidikan. Melalui evaluasi akan diperoleh informasi tentang apa yang telah dicapai dan mana yang belum tercapai dari sebuah program. Informasi hasil evaluasi selanjutnya digunakan sebagai bahan perbaikan program tersebut.

Soeprapto dalam Silitonga (2022: 12) mengemukakan bahwa tujuan evaluasi adalah untuk memberikan data yang benar, dan dapat dipercaya serta memberikan realitas evaluasi yang diadakan yang berhubungan dengan politik, keadaan yang ada dan dibatasi oleh waktu, uang, dan sumber daya manusia.

Menurut Situmorang dalam Situmorang (2020) evaluasi kebijakan dilakukan guna menemukan penyebab dari kegagalan kebijakan dan apakah kebijakan tersebut berakhir pada dampak yang dicitacitakan. Sehingga, tidak heran jika evaluasi dikatakan kegiatan fungsional yang tidak hanya dilakukan

diakhir, tetapi juga pada setiap tahapan kebijakan. Kegiatan evaluasi terdiri dari *spesification, measurement*, analisis dan rekomendasi.

Rusdiana (2017) dalam Poespito Hadi (2024: 6) mengartikan evaluasi merupakan proses sistematis dan berkelanjutan untuk mengumpulkan, mendeskripsikan, dan menyajikan informasi untuk dapat digunakan sebagai dasar membuat keputusan, menyusun kebijakan ataupun menyusun program yang akan datang.

Untuk mengetahui keberhasilan suatu kebijakan perlu dikembangkan beberapa indikator, dalam arti hasil penilaiannya dapat tunggal akan membahayakan, dalam arti hasil penilaiannya dapat dari yang sesungguhnya, indikator kriteria yang dikembangkan oleh Dunn (2003) dalam Dewi (2021) mencakup enam indikator sebagai berikut:

- a. Efektivitas.
- b. Efisiensi.
- c. Responsivitas.
- d. Ketepatan.

Evaluasi dapat memiliki manfaat untuk memberikan gambaran tentang suatu program, membantu mengambil keputusan, menjadi dasar perbaikan di masa depan, dan menilai efisiensi dan efektivitas. Evaluasi biasanya dilakukan melalui metode tertentu, seperti observasi, wawancara, survei, atau analisis data, serta relevan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Tujuan utama dari evaluasi adalah untuk menentukan sejauh mana tujuan telah tercapai, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, serta memberikan umpan balik untuk perbaikan.

2.4 Teori Manajemen Sumber Daya Manusia

Menurut Rahardjo, (2022: 8) Sumber daya manusia adalah proses menyatukan orang dan organisasi sehingga kebutuhan masing-masing terpenuhi. Dengan cara mengelola sumber daya manusia (SDM) secara efektif dan efisien. Manajemen sumber daya manusia mencakup sejumlah aktivitas seperti rekrutmen, seleksi, pelatihan, pengembangan, evaluasi kinerja, kompensasi, dan manajemen hubungan industrial.

Menurut Schuler, et al (1992) dalam Sutrisno, (2017: 6) mengartikan Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM), merupakan pengakuan tentang pentingnya tenaga kerja organisasi sebagai sumber daya manusia yang sangat penting dalam memberi kontribusi bagi tujuan-tujuan organisasi, dan menggunakan beberapa fungsi dan kegiatan untuk memastikan bahwa SDM tersebut digunakan secara efektif dan adil bagi kepentingan individu, organisasi, dan masyarakat.

Menurut A.F. Stoner dalam Rusby, (2017: 2) manajemen sumber daya manusia adalah suatu prosedur yang berkelanjutan yang bertujuan untuk memasok suatu organisasi atau perusahaan dengan orang-orang yang tepat untuk ditempatkan pada posisi dan jabatan yang tepat pada saat organisasi yang memerlukannya.

Dalam pandangan para ahli yang disebutkan, manajemen sumber daya manusia (MSDM) merupakan aspek penting bagi keberhasilan suatu organisasi karena mengedepankan peran tenaga kerja sebagai sumber daya yang berharga.

Ketiga pendapat ini menggaris bawahi pentingnya MSDM sebagai faktor utama dalam pencapaian tujuan organisasi. MSDM tidak hanya berfokus pada

pemenuhan kebutuhan organisasi, tetapi juga harus memperhatikan kesejahteraan tenaga kerja agar mereka dapat memberikan kontribusi optimal.

Ini menunjukkan bahwa manajemen sumber daya manusia tidak hanya tentang mengelola tenaga kerja, tetapi juga tentang mendukung kinerja dan kesejahteraan mereka dalam lingkup organisasi. Dan mencakup berbagai fungsi kegiatan agar sumber daya manusia digunakan dengan efektif dan adil.

Tujuan Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) adalah untuk memastikan bahwa organisasi memiliki tenaga kerja yang efektif, produktif, dan puas sehingga dapat mencapai tujuan dan visi organisasi.

Menurut Cushway dalam Ajabar (2020: 5) tujuan manajemen SDM meliputi beberapa hal:

- a. Memberi pertimbangan manajemen dalam membuat kebijakan tentang SDM.
- b. Mengimplementasikan dan menjaga semua kebijakan dan prosedur SDM.
- c. Membantu dalam pengembangan arah dan strategi organisasi.
- d. Memberi dukungan dan kondisi tertentu yang dapat membantu manajer lini dalam mencapai tujuan organisasi.
- e. Menangani berbagai krisis dan situasi sulit antara pekerja dan organisasi.
- f. Menyediakan media komunikasi antara pekerja dan organisasi.
- g. Memelihara standar organisasional dan nilai-nilai dalam Manajemen SDM

2.5 Gambaran Umum Tentang Bumdes

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dalam Kamaroesid, (2016: 2) Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan badan usaha dengan sebagian besar atau seluruh permodalan atas milik suatu desa dengan cara menyertakan dengan cara langsung dengan bersumber dari potensi desa yang telah terpisahkan yang digunakan dengan tujuan untuk jasa pelayanan, pengelolaan aset, serta usaha-usaha yang lain dengan tujuan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat.

Bumdes memiliki peran strategis dalam meningkatkan perekonomian desa dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Bumdes dibentuk untuk mengoptimalkan potensi yang ada di desa, baik sumber daya alam, tenaga kerja lokal, maupun aset lainnya yang bisa dikelola untuk kesejahteraan bersama.

keberadaan bumdes juga membuka peluang bagi masyarakat untuk memperoleh lapangan pekerjaan, meningkatkan kemampuan kewirausahaan, dan memberikan peluang bagi desa untuk mengembangkan produk atau jasa yang memiliki daya saing. Misalnya, bumdes bisa bergerak di sektor pertanian, peternakan, perdagangan, pariwisata, hingga layanan keuangan mikro yang dikelola secara mandiri.

Dalam Putra (2015: 26) pada prinsipnya, pendirian bumdes merupakan salah satu pilihan desa dalam gerakan usaha ekonomi desa Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Desa, Pasal 132 ayat (1) PP Desa dan Pasal 4 Permendesa PDTT No. 4/2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran bumdes. Frasa “*dapat mendirikan bumdes*” dalam peraturan perundang-undangan

tentang desa tersebut menunjukkan pengakuan dan penghormatan terhadap prakarsa desa dalam gerakan usaha ekonomi.

Di sini menunjukkan bahwa pendirian bumdes wajib di dirikan di setiap desa dengan 1 bumdes tidak lebih dan bumdes di dirikan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Dengan mendirikan bumdes berpotensi besar untuk mendukung ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.6 Tujuan Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Djae (2023: 18) tujuan awal pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dimaksudkan untuk mendorong atau menampung seluruh kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat, baik yang berkembang menurut adat Istiadat dan budaya setempat, maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk di kelola oleh masyarakat melalui program atau proyek Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah.

Kadek, (2018) adapun tujuan pendirian bumdes disebutkan pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, 21 Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa pada Pasal 3. Di dalam pasal 3 disebutkan 8 tujuan utama pendirian bumdes yaitu :

- a. Meningkatkan perekonomian desa.
- b. Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa.
- c. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa.
- d. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga.

- e. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga.
- f. Membuka lapangan kerja.
- g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa, dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa.

Dengan demikian, bumdes memiliki tujuan untuk mendorong kemandirian ekonomi desa melalui optimalisasi potensi dan sumber daya lokal. Bumdes diharapkan menjadi pilar ekonomi desa yang berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

2.7 Tantangan Dalam Pengelolaan bumdes

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga yang didirikan oleh pemerintah desa untuk mengelola potensi ekonomi desa demi kesejahteraan masyarakat. Meski potensial, bumdes seringkali menghadapi berbagai tantangan yang menghambat perkembangannya.

Menurut Resti, (2019) Pada proses pengelolaan bumdes, seringkali ditemui beberapa tantangan yang harus diselesaikan oleh pengelola atau pengurus bumdes. Adapun beberapa tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan adalah masalah pengaturan organisasi, menemukan dan mengembangkan potensi desa, dan masalah promosi. Bumdes perlu meningkatkan kapasitas SDM, memperkuat pengaturan organisasi, serta merancang strategi promosi yang efektif.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, diperlukan dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, masyarakat, serta pihak swasta. Pemerintah daerah dapat membantu melalui pendampingan dan

pelatihan bagi para pengurus bumdes, sehingga mereka lebih terampil dalam mengelola organisasi dan mampu memanfaatkan potensi desa dengan lebih optimal.

2.8 Konsep Pendampingan dan Pelatihan

Menurut Sendari, (2023) mentoring (pendampingan) adalah proses berbagi pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman hidup untuk membimbing orang lain mencapai potensi penuh mereka.

Pendampingan merupakan suatu proses yang bertujuan untuk memberikan dukungan, pengetahuan, serta keterampilan kepada individu atau kelompok untuk mencapai perkembangan dan tujuan tertentu.

Said & Firman, (2022: 57-59) pelatihan merupakan upaya pembelajaran yang diselenggarakan oleh organisasi. Baik dari pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat atau perusahaan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan organisasi. Berikut ini beberapa konsep pelatihan yang dikemukakan oleh para ahli:

Sudjana (2000) berpendapat bahwa pelatihan adalah suatu usaha pembelajaran yang diselenggarakan oleh organisasi (instansi pemerintah, lembaga swadaya masyarakat dan perusahaan). Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan atau untuk mencapai tujuan organisasi.

Menurut Sulistiyani dan Rosidah (2010) Pelatihan kerja adalah proses sistematis pengubahan perilaku para karyawan/pegawai dalam suatu arah guna meningkatkan tujuan-tujuan organisasional dengan tujuan untuk mempertahankan, menjaga, memelihara karyawan dan sekaligus meningkatkan keahlian para karyawan untuk dapat meningkatkan kinerjanya.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan. Penelitian lapangan merupakan penelitian kualitatif dimana peneliti melakukan observasi dan terlibat langsung dalam penelitian dengan populasi yang diteliti. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif ini, seluruh fakta yang ditemukan di lapangan mengenai Evaluasi Kebijakan Pelatihan dan Pendampingan Untuk Meningkatkan Sdm Pengelola Bumdes di Desa Marsawa, Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi dapat disajikan dan dideskripsikan seperti yang muncul dalam laporan penelitian.

Oleh karena itu, laporan penelitian ini akan memuat sari-sari data yang memberikan gambaran tentang Evaluasi Kebijakan Pelatihan dan Pendampingan Untuk Meningkatkan Sdm Pengelola Bumdes di Desa Marsawa, Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi.

3.2 Informan Penelitian

Informan Penelitian adalah individu atau kelompok yang memberikan informasi atau data kepada peneliti untuk keperluan penelitian. Mereka berperan sebagai sumber data yang dapat memberikan wawasan, pengetahuan, atau pengalaman terkait dengan topik penelitian yang sedang dijalankan. Informan ini dapat berasal dari berbagai latar belakang, tergantung pada fokus penelitian, dan informasi yang mereka berikan sangat penting untuk membantu peneliti memahami fenomena yang sedang diteliti.

Teknik penyusunan informan pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.

Tabel 3.1: Informan Penelitian

No	Nama Responden	Jumlah		Persentase
		Informan	Jumlah	
1	Kepala Desa	1	1	10%
2	Direktur Bumdes	1	1	10%
3	Pengawas Bumdes	1	1	10%
4	Sekretaris Bumdes	1	1	10%
5	Bendahara Bumdes	1	1	10%
6	Staf Bumdes	2	2	20%
7	Anggota BPD Desa Marsawa	1	1	10%
8	Tokoh Masyarakat	2	2	20%
Total		10	10	100%

Sumber: Modifikasi Peneliti Tahun 2024

3.3 Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat dua sumber data yang di gunakan, yaitu:

3.3.1 Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama atau langsung dari objek penelitian. Data ini dikumpulkan oleh peneliti untuk tujuan spesifik dari penelitian yang sedang dilakukan. Karena data primer bersifat asli dan langsung diperoleh dari lapangan, maka data ini dianggap lebih valid dan relevan untuk tujuan penelitian tertentu.

3.3.2 Data Skunder

Data sekunder adalah data yang sudah ada sebelumnya dan dikumpulkan oleh pihak lain untuk tujuan yang berbeda dengan tujuan penelitian yang sedang dilakukan. Data ini biasanya tersedia dalam bentuk laporan, dokumen, publikasi, atau database yang sudah ada.

3.4 Fokus Penelitian

Fokus penelitian yang dilakukan adalah melakukan penelitian terhadap Evaluasi Kebijakan Pelatihan Dan Pendampingan Dalam Meningkatkan Sdm Pengelola Bumdes di Desa Marsawa Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi.

3.5 Lokasi Penelitian

Tempat penelitian merupakan tempat penelitian dilakukan. Dengan diteptakan lokasi, akan lebih mudah untuk mengetahui dimana tempat suatu penelitian akan dilakukan. Lokasi penelitian dilakukan di lingkungan masyarakat Desa Marsawa, Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi, Kode pos 29562.

3.6 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, peneliti menggunakan berbagai teknik untuk mengumpulkan data dilapangan sebagai berikut:

3.6.1 Observasi

Menurut Sutrisno (1986) dalam Anggito dan Setiawan, (2018: 109) mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Teknik pengumpul data observasi dilakukan dengan cara mengamati langsung objek penelitian di lapangan.

3.6.2 Wawancara

Menurut Machfudz, et al (2022: 42) wawancara artinya peneliti mengajukan beberapa pertanyaan secara mendalam yang berhubungan dengan fokus

permasalahan, sehingga dengan wawancara mendalam ini data-data dapat dikumpulkan semaksimal mungkin.

3.6.3 Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mengkaji dokumen yang ada, seperti catatan, laporan, foto, video, artikel, dan arsip lainnya.

3.6.4 Triangulasi

Teknik triangulasi untuk memvalidasi atau mengonfirmasi data dengan membandingkan data dari berbagai sumber atau metode yang berbeda.

3.7 Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan, dan setelah selesai di lapangan. Namun dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih di fokuskan selama di proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data.

Analisis selama dilapangan model Miles dan Huberman (1984) (dalam Harahap, 2020) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisi data, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi.

3.7.1 Reduksi Data

Reduksi data adalah proses penyederhanaan, pemilihan, atau pemangkasan data kualitatif agar lebih terfokus dan mudah dianalisis. Dalam penelitian kualitatif, data sering kali diperoleh dalam jumlah besar, seperti transkrip wawancara, catatan lapangan, atau dokumen lain, sehingga memerlukan proses

untuk mengidentifikasi data yang relevan dan membuang informasi yang tidak diperlukan.

3.7.2 Penyajian Data

Penyajian data adalah proses mengorganisasi dan menampilkan data yang telah dianalisis dalam bentuk yang lebih mudah dipahami, sehingga memudahkan interpretasi dan pengambilan keputusan. Dalam penyajian data, informasi disusun secara terstruktur agar audiens dapat melihat pola, hubungan, atau temuan penting dari data dengan lebih jelas.

3.7.3 Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dijelaskan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada di lapangan.

3.8 Jadwal Penelitian

Tabel 3.2 : Jadwal Penelitian Tentang Evaluasi Kebijakan Pelatihan dan Pendampingan Dalam Meningkatkan Sdm Pengelola Bumdes di Desa Marsawa Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi.

NO	Kegiatan	Bulan dan Minggu Tahun 2024-2025															
		Nov/Des				Jan/Feb				Mar-Juli				Agustus			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul																
2	Pembuatan Proposal																
3	Bimbingan Proposal																
4	Ujian Proposal																
5	Revisi Proposal																
6	Bimbingan Skripsi																
7	Ujian Skripsi																
8	Revisi Skripsi																

Sumber : Modifikasi Peneliti Tahun 2024

VI. PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian lapangan mengenai Evaluasi Kebijakan Pelatihan dan Pendampingan Dalam Meningkatkan SDM Pengelola Bumdes di Desa Marsawa Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi, maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa Evaluasi Kebijakan Pelatihan dan Pendampingan Dalam Meningkatkan SDM Pengelola Bumdes di Desa Marsawa Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi sudah baik.

1.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Pemerintah Desa Marsawa disarankan untuk terus melanjutkan dan mengembangkan program pelatihan dan pendampingan, terutama dengan memperbarui materi pelatihan sesuai dengan perkembangan kebutuhan pasar dan teknologi, agar pengelola BUMDes dapat terus beradaptasi dan berkembang.
2. BUMDes Desa Marsawa diharapkan lebih aktif menjalin kerja sama dengan pihak eksternal seperti instansi pemerintah, swasta, maupun perguruan tinggi, guna memperluas jejaring, menambah wawasan, dan meningkatkan peluang usaha yang dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat.
3. Pengelola BUMDes disarankan untuk memperkuat koordinasi internal dan menjaga semangat kerja tim, agar seluruh unit usaha dapat dikelola secara profesional, berkelanjutan, dan akuntabel.

4. Pemerintah Kecamatan maupun Kabupaten diharapkan memberikan dukungan berkelanjutan baik dalam bentuk pendampingan teknis, supervisi, maupun bantuan dana operasional, agar BUMDes di Desa Marsawa dapat terus tumbuh dan memberi dampak positif bagi perekonomian desa.
5. Masyarakat Desa Marsawa juga diharapkan untuk aktif mendukung kegiatan BUMDes serta ikut berpartisipasi dalam memanfaatkan dan mengembangkan usaha-usaha yang telah dirintis, sehingga manfaat dari BUMDes dapat dirasakan secara merata dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aljabar. (2020). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Sleman: Deepublish Digital.
- Anggito, Albi & Setiawan, Johan. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Publik.
- Dewi, D.S.K. (2022). *Buku Ajar Kebijakan Publik: Proses, Implementasi dan Evaluasi*. Yogyakarta: Samudra Biru.
- Djae, Raoda M., et al. (2023). *Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Konsep dan Aplikasi*. eureka media aksara.
- Kadek Sumiasih. 2018. "Peran Bumdes Dalam Pengelolaan Sektor Pariwisata". *Magister Hukum Udayana*, 7(4), 574.
- Kosassy, Siti Osa. (2024). *Kebijakan Publik* Yogyakarta: Samudra Biru
- Harahap, Nursapia. (2020). *Penelitian Kualitatif*. Medan: Wal Ashri Publishing.
- Hildawati. (2024). *Sistem Administrasi Negara*. Dumai: PT. Green Pustaka Indonesia.
- Machfudz, Masyhuri, et al. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Dilengkapi Dengan Contoh "Riset" Fenomologi)*. Malang: Literasi Nusantara Abadi.
- Mulyawan, Wawan. (2024). *Buku Referensi Administrasi Negara*. Litnus
- Poespitoahadi, Wibisono. (2024). *Evaluasi Kebijakan Penataan Wilayah Pertahanan Darat Menurut PP NO 68 Tahun 2014*. Sumedang: Mega Press.
- Prasetya, Ferry & Pangestuty.F.W. (2021). *Analisis Kebijakan Publik: Pendekatan Ekonomi dan Studi Kasus*. Malang: UB Pers.
- Putra, A.S. (2015). *Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa*. Jakarta: Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 9.
- Rahardjo, D.A.S. (2022). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. yayasan prima agus teknik.
- Remaja, I Nyoman Gede. (2017). *Hukum Administrasi Negara*. Singaraja.
- Resti, Ayu. (2019). Tantangan Dalam Pengelolaan Bumdes Apa Saja?. <https://blog.bumdes.id/tantangan-dalam-pengelolaan-bumdes-apa-saja/>. accessed on November 14 st, 2024.
- Rusby, Zulkifli (2017). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Rajawali Pers.

Said, Muh dan Firman, Ahmad. (2022). *Konsep dan Pengukuran Efektivitas Pelatihan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia*. Makassar: Nobel Pers.

Sendari, A.A. 2023. Mentoring Adalah Pendamping, Kenali Manfaatnya Untuk Karier, Jakarta. <https://www.liputan6.com/hot/read/5283549/mentoring-adalah-pendampingan-kenali-manfaatnya-untuk-karier>. downloaded at November, 14, 2024.

Silitonga, Dikson. 2022. *Evaluasi Implementasi Kebijakan Publik*. Banyumas: CV.ZT CORPORA.

Situmorang.S.H. (2020). “ Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan)”. Vol 1. No 1. Maret 2020. Yogyakarta.

Sutrisno, Edy. (2017). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Kencana.

Uddin B. Sore dan Sobirin. (2017). *Kebijakan Publik*. Makasar: CV Sah Media.